

ARTIKEL AKADEMIK

Globalisasi Berganti Wajah

Fragmentasi, regionalisasi, digitalisasi, transisi hijau, dan strategi Indonesia

Prof. Rudy C. Tarumingkeng, Ph.D.

www.rudyct.com/cv.pdf

Bogor, 2026



GLOBALISASI BERGANTI WAJAH



EFISIENSI



KETERBUKAAN
STRATEGIS



NILAI TAMBAH
INDONESIA

Oleh: Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, Ph.D.

Abstrak

Artikel ini menjelaskan perubahan wajah globalisasi dari pola hyperglobalization yang menekankan efisiensi menuju tatanan yang lebih berlapis, regional, digital, hijau, dan dipengaruhi pertimbangan keamanan. Globalisasi tidak berakhir; arus barang, jasa, modal, data, teknologi, manusia, dan gagasan sedang direkonfigurasi oleh pandemi, rivalitas geopolitik, kebijakan industri, kontrol ekspor, kecerdasan artifisial, transisi energi, serta tuntutan ketahanan rantai pasok. Analisis membahas re-globalization, friendshoring, regionalisasi rantai nilai, kebangkitan negara dalam ekonomi, perang semikonduktor, perdagangan jasa digital, kekuasaan platform, mineral kritis, pangan dan energi, keuangan, migrasi, ketimpangan, serta kontrak sosial. Perhatian khusus diberikan pada ASEAN dan peluang Indonesia menjadi negara konektor yang tidak sekadar menerima relokasi, melainkan meningkatkan produktivitas, teknologi, pemasok lokal, dan nilai tambah domestik. Kesimpulannya, strategi terbaik bukan autarki atau keterbukaan tanpa syarat, melainkan keterbukaan strategis: diversifikasi, kapasitas nasional, kerja sama multilateral, inklusi sosial, dan keberlanjutan ekologis.

Kata Kunci: globalisasi; re-globalization; fragmentasi geoekonomi; rantai nilai global; regionalisasi; kebijakan industri; perdagangan digital; transisi hijau; ASEAN; Indonesia.

Ringkasan Eksekutif

- Globalisasi tidak menghilang; ia bergeser dari jaringan yang mengejar biaya terendah menuju jaringan yang juga menilai keamanan, ketahanan, karbon, dan politik.
- Regionalisasi, friendshoring, dan kebijakan industri mengubah geografi produksi, tetapi tidak menghapus kebutuhan akan perdagangan serta spesialisasi global.
- Jasa digital dan AI menjadi mesin integrasi baru, sementara platform, compute, data, dan standar membentuk sumber kekuasaan ekonomi yang baru.
- Transisi hijau menciptakan peluang mineral dan manufaktur bagi Indonesia, sekaligus menaikkan tuntutan energi bersih, traceability, dan pemulihan ekologis.
- Indonesia perlu menempuh keterbukaan strategis: beragam mitra, kapasitas domestik, upgrading teknologi, perlindungan sosial, dan diplomasi aktif.

Pendahuluan: Globalisasi Tidak Berakhir

Perubahan arus barang, jasa, modal, data, teknologi, manusia, dan gagasan setelah pandemi, konflik, serta rivalitas kekuatan besar perlu ditempatkan dalam sejarah panjang globalisasi. Gelombang sebelumnya mengurangi biaya transportasi dan komunikasi, memecah proses produksi lintas negara, serta memperbesar peran perusahaan multinasional. Kini logika tersebut bertemu dengan konflik, pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan kebijakan keamanan. Arus lintas batas tetap besar, tetapi komposisi, tujuan, dan instrumennya berubah. Barang tertentu diproduksi lebih dekat, sementara jasa, data, modal intelektual, dan pekerjaan profesional justru semakin mudah bergerak. Karena itu satu indikator, seperti rasio perdagangan barang terhadap PDB, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa globalisasi sedang berakhir.

Secara ekonomi, keterhubungan tetap memberi skala, spesialisasi, pengetahuan, dan kesempatan pembangunan. Integrasi memperluas pasar, memungkinkan spesialisasi, mempercepat difusi teknologi, dan memberi konsumen pilihan yang lebih besar. Perusahaan memperoleh input serta pengetahuan dari banyak lokasi; negara berkembang dapat masuk ke rantai nilai tanpa terlebih dahulu membangun seluruh industri. Namun manfaat itu bergantung pada complementarities: logistik, pendidikan, institusi, energi, pembiayaan, standar, dan kemampuan perusahaan lokal. Keterbukaan yang tidak disertai kemampuan belajar dapat menghasilkan partisipasi dangkal. Sebaliknya, proteksi tanpa disiplin dapat menciptakan rente dan perusahaan yang tidak pernah kompetitif.

Dilema muncul karena narasi deglobalisasi sering menyederhanakan proses yang sesungguhnya sedang bergeser bentuk dan jalurnya. Efisiensi dan ketahanan bukan dua kutub yang selalu bertentangan, tetapi memerlukan desain jaringan yang tepat. Inventori, multiple sourcing, modularity, visibility, dan hubungan pemasok jangka panjang dapat menambah resilience tanpa memindahkan seluruh produksi ke dalam negeri. Lokalisasi mungkin diperlukan bagi barang strategis tertentu, tetapi biaya peluangnya harus dihitung. Ketika semua sektor menyatakan diri strategis, kebijakan keamanan berubah menjadi proteksionisme permanen. Negara perlu membedakan ketergantungan biasa, ketergantungan terkonsentrasi, dan ketergantungan yang benar-benar mengancam fungsi esensial.

Karena itu, arah yang dianjurkan ialah membaca globalisasi sebagai jaringan yang direkonfigurasi, bukan tombol yang hanya terbuka atau tertutup. Keberhasilan harus diukur melalui produktivitas, keragaman pemasok dan pasar, waktu pemulihan, ekspor bernilai tambah, kualitas pekerjaan, intensitas pengetahuan, emisi, serta kemampuan perusahaan domestik naik kelas. Nilai ekspor bruto tidak cukup bila input, teknologi, pembiayaan, dan laba utama tetap berasal dari luar. Jumlah investasi juga tidak cukup bila proyek menjadi enclave. Scorecard perlu menilai domestic value added, local supplier development, R&D, keterampilan, transfer teknologi, dan hubungan dengan universitas maupun UMKM.

Pada akhirnya, membaca globalisasi sebagai jaringan yang direkonfigurasi, bukan tombol yang hanya terbuka atau tertutup. Globalisasi baru harus dikelola sebagai interdependensi yang memiliki manfaat sekaligus risiko. Diversifikasi tidak berarti memutus hubungan; ketahanan tidak berarti autarki; kebijakan industri tidak berarti menutup persaingan; dan keamanan tidak boleh menjadi alasan tanpa batas. Indonesia memerlukan pilihan mitra, kemampuan domestik, aturan yang konsisten, serta mekanisme koreksi. Dengan fondasi tersebut, keterhubungan global dapat dipakai untuk mempercepat pembelajaran, menyebarkan peluang, menjaga stabilitas, dan mengarahkan perubahan teknologi serta ekologis kepada kesejahteraan masyarakat.

Dari Hyperglobalization menuju Re-globalization

Pergeseran dari efisiensi biaya tunggal menuju keseimbangan antara efisiensi, keamanan, ketahanan, inklusi, dan keberlanjutan perlu ditempatkan dalam sejarah panjang globalisasi. Gelombang sebelumnya mengurangi biaya transportasi dan komunikasi, memecah proses produksi lintas negara, serta memperbesar peran perusahaan multinasional. Kini logika tersebut bertemu dengan konflik, pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan kebijakan keamanan. Arus lintas batas tetap besar, tetapi komposisi, tujuan, dan instrumennya berubah. Barang tertentu diproduksi lebih dekat, sementara jasa, data, modal intelektual, dan pekerjaan profesional justru semakin mudah bergerak. Karena itu satu indikator, seperti rasio perdagangan barang terhadap PDB, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa globalisasi sedang berakhir.

Secara ekonomi, re-globalization dapat memperluas integrasi kepada negara, kelompok, dan isu yang sebelumnya tertinggal. Integrasi memperluas pasar, memungkinkan spesialisasi, mempercepat difusi teknologi, dan memberi konsumen pilihan yang lebih besar. Perusahaan memperoleh input serta pengetahuan dari banyak lokasi; negara berkembang dapat masuk ke rantai nilai tanpa terlebih dahulu membangun seluruh industri. Namun manfaat itu bergantung pada complementarities: logistik, pendidikan, institusi, energi, pembiayaan, standar, dan kemampuan perusahaan lokal. Keterbukaan yang tidak disertai kemampuan belajar dapat menghasilkan partisipasi dangkal. Sebaliknya, proteksi tanpa disiplin dapat menciptakan rente dan perusahaan yang tidak pernah kompetitif.

Dilema muncul karena fragmentasi blok dapat mempersempit pemasok, menaikkan biaya, serta memperbesar ketidakpastian. Efisiensi dan ketahanan bukan dua kutub yang selalu bertentangan, tetapi memerlukan desain jaringan yang tepat. Inventori, multiple sourcing, modularity, visibility, dan hubungan pemasok jangka panjang dapat menambah resilience tanpa memindahkan seluruh produksi ke dalam negeri. Lokalisasi mungkin diperlukan bagi barang strategis tertentu, tetapi biaya peluangnya harus dihitung. Ketika semua sektor menyatakan diri strategis, kebijakan keamanan berubah menjadi proteksionisme permanen. Negara perlu membedakan ketergantungan biasa, ketergantungan terkonsentrasi, dan ketergantungan yang benar-benar mengancam fungsi esensial.

Karena itu, arah yang dianjurkan ialah mempertahankan keterbukaan sambil memperbaiki distribusi manfaat dan tata kelola risiko. Keberhasilan harus diukur melalui produktivitas, keragaman pemasok dan pasar, waktu pemulihan, ekspor bernilai tambah, kualitas pekerjaan, intensitas pengetahuan, emisi, serta kemampuan perusahaan domestik naik kelas. Nilai ekspor bruto tidak cukup bila input, teknologi, pembiayaan, dan laba utama tetap berasal dari luar. Jumlah investasi juga tidak cukup bila proyek menjadi enclave. Scorecard perlu menilai domestic value added, local supplier development, R&D, keterampilan, transfer teknologi, dan hubungan dengan universitas maupun UMKM.

Geopolitik Masuk ke Neraca Perusahaan

Masuknya sanksi, tarif, kontrol ekspor, screening investasi, dan keamanan nasional ke keputusan bisnis sehari-hari perlu ditempatkan dalam sejarah panjang globalisasi. Gelombang sebelumnya mengurangi biaya transportasi dan komunikasi, memecah proses produksi lintas negara, serta memperbesar peran perusahaan multinasional. Kini logika tersebut bertemu dengan konflik, pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan kebijakan keamanan. Arus lintas batas tetap besar, tetapi komposisi, tujuan, dan instrumennya berubah. Barang tertentu diproduksi lebih dekat, sementara jasa, data, modal intelektual, dan pekerjaan profesional justru semakin mudah bergerak. Karena itu satu indikator, seperti rasio perdagangan barang terhadap PDB, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa globalisasi sedang berakhir.

Secara ekonomi, kesadaran risiko geopolitik mendorong diversifikasi dan kesiapan menghadapi gangguan. Integrasi memperluas pasar, memungkinkan spesialisasi, mempercepat difusi teknologi, dan memberi konsumen pilihan yang lebih besar. Perusahaan memperoleh input serta pengetahuan dari banyak lokasi; negara berkembang dapat masuk ke rantai nilai tanpa terlebih dahulu membangun seluruh industri. Namun manfaat itu bergantung pada complementarities: logistik, pendidikan, institusi, energi, pembiayaan, standar, dan kemampuan perusahaan lokal. Keterbukaan yang tidak disertai kemampuan belajar dapat menghasilkan partisipasi dangkal. Sebaliknya, proteksi tanpa disiplin dapat menciptakan rente dan perusahaan yang tidak pernah kompetitif.

Dilema muncul karena hubungan dagang dapat dipersenjatai dan keputusan investasi menjadi tunduk pada pembelahan politik. Efisiensi dan ketahanan bukan dua kutub yang selalu bertentangan, tetapi

memerlukan desain jaringan yang tepat. Inventori, multiple sourcing, modularity, visibility, dan hubungan pemasok jangka panjang dapat menambah resilience tanpa memindahkan seluruh produksi ke dalam negeri. Lokalisasi mungkin diperlukan bagi barang strategis tertentu, tetapi biaya peluangnya harus dihitung. Ketika semua sektor menyatakan diri strategis, kebijakan keamanan berubah menjadi proteksionisme permanen. Negara perlu membedakan ketergantungan biasa, ketergantungan terkonsentrasi, dan ketergantungan yang benar-benar mengancam fungsi esensial.

Karena itu, arah yang dianjurkan ialah membangun geoeconomic literacy, scenario planning, dan diplomasi ekonomi yang konsisten. Keberhasilan harus diukur melalui produktivitas, keragaman pemasok dan pasar, waktu pemulihan, ekspor bernilai tambah, kualitas pekerjaan, intensitas pengetahuan, emisi, serta kemampuan perusahaan domestik naik kelas. Nilai ekspor bruto tidak cukup bila input, teknologi, pembiayaan, dan laba utama tetap berasal dari luar. Jumlah investasi juga tidak cukup bila proyek menjadi enclave. Scorecard perlu menilai domestic value added, local supplier development, R&D, keterampilan, transfer teknologi, dan hubungan dengan universitas maupun UMKM.

Pada akhirnya, membangun geoeconomic literacy, scenario planning, dan diplomasi ekonomi yang konsisten. Globalisasi baru harus dikelola sebagai interdependensi yang memiliki manfaat sekaligus risiko. Diversifikasi tidak berarti memutus hubungan; ketahanan tidak berarti autarki; kebijakan industri tidak berarti menutup persaingan; dan keamanan tidak boleh menjadi alasan tanpa batas. Indonesia memerlukan pilihan mitra, kemampuan domestik, aturan yang konsisten, serta mekanisme koreksi. Dengan fondasi tersebut, keterhubungan global dapat dipakai untuk mempercepat pembelajaran, menyebarkan peluang, menjaga stabilitas, dan mengarahkan perubahan teknologi serta ekologis kepada kesejahteraan masyarakat.

Rantai Nilai Global Menjadi Lebih Regional

Penataan ulang produksi melalui nearshoring, friendshoring, china-plus-one, hub regional, dan pemasok berlapis perlu ditempatkan dalam sejarah panjang globalisasi. Gelombang sebelumnya mengurangi biaya transportasi dan komunikasi, memecah proses produksi lintas negara, serta memperbesar peran perusahaan multinasional. Kini logika tersebut bertemu dengan konflik, pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan kebijakan keamanan. Arus lintas batas tetap besar, tetapi komposisi, tujuan, dan instrumennya berubah. Barang tertentu diproduksi lebih dekat, sementara jasa, data, modal intelektual, dan pekerjaan profesional justru semakin mudah bergerak. Karena itu satu indikator, seperti rasio perdagangan barang terhadap PDB, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa globalisasi sedang berakhir.

Secara ekonomi, regionalisasi dapat menurunkan lead time serta memperkuat koordinasi dan respons terhadap gangguan. Integrasi memperluas pasar, memungkinkan spesialisasi, mempercepat difusi teknologi, dan memberi konsumen pilihan yang lebih besar. Perusahaan memperoleh input serta pengetahuan dari banyak lokasi; negara berkembang dapat masuk ke rantai nilai tanpa terlebih dahulu membangun seluruh industri. Namun manfaat itu bergantung pada complementarities: logistik, pendidikan, institusi, energi, pembiayaan, standar, dan kemampuan perusahaan lokal. Keterbukaan yang tidak disertai kemampuan belajar dapat menghasilkan partisipasi dangkal. Sebaliknya, proteksi tanpa disiplin dapat menciptakan rente dan perusahaan yang tidak pernah kompetitif.

Dilema muncul karena kedekatan geografis tidak otomatis menghilangkan konsentrasi, biaya tinggi, atau risiko sistemik. Efisiensi dan ketahanan bukan dua kutub yang selalu bertentangan, tetapi memerlukan desain jaringan yang tepat. Inventori, multiple sourcing, modularity, visibility, dan hubungan pemasok jangka panjang dapat menambah resilience tanpa memindahkan seluruh produksi ke dalam negeri.

Lokalisasi mungkin diperlukan bagi barang strategis tertentu, tetapi biaya peluangnya harus dihitung. Ketika semua sektor menyatakan diri strategis, kebijakan keamanan berubah menjadi proteksionisme permanen. Negara perlu membedakan ketergantungan biasa, ketergantungan terkonsentrasi, dan ketergantungan yang benar-benar mengancam fungsi esensial.

Karena itu, arah yang dianjurkan ialah menggabungkan diversifikasi global, kedalaman regional, dan kapasitas domestik yang saling melengkapi. Keberhasilan harus diukur melalui produktivitas, keragaman pemasok dan pasar, waktu pemulihan, ekspor bernilai tambah, kualitas pekerjaan, intensitas pengetahuan, emisi, serta kemampuan perusahaan domestik naik kelas. Nilai ekspor bruto tidak cukup bila input, teknologi, pembiayaan, dan laba utama tetap berasal dari luar. Jumlah investasi juga tidak cukup bila proyek menjadi enclave. Scorecard perlu menilai domestic value added, local supplier development, R&D, keterampilan, transfer teknologi, dan hubungan dengan universitas maupun UMKM.

Ketahanan Bukan Autarki

Perbedaan antara kemampuan pulih melalui diversifikasi dengan swasembada menyeluruh yang menolak perdagangan perlu ditempatkan dalam sejarah panjang globalisasi. Gelombang sebelumnya mengurangi biaya transportasi dan komunikasi, memecah proses produksi lintas negara, serta memperbesar peran perusahaan multinasional. Kini logika tersebut bertemu dengan konflik, pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan kebijakan keamanan. Arus lintas batas tetap besar, tetapi komposisi, tujuan, dan instrumennya berubah. Barang tertentu diproduksi lebih dekat, sementara jasa, data, modal intelektual, dan pekerjaan profesional justru semakin mudah bergerak. Karena itu satu indikator, seperti rasio perdagangan barang terhadap PDB, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa globalisasi sedang berakhir.

Secara ekonomi, jaringan pemasok yang beragam dapat menyerap guncangan dari satu lokasi atau negara. Integrasi memperluas pasar, memungkinkan spesialisasi, mempercepat difusi teknologi, dan memberi konsumen pilihan yang lebih besar. Perusahaan memperoleh input serta pengetahuan dari banyak lokasi; negara berkembang dapat masuk ke rantai nilai tanpa terlebih dahulu membangun seluruh industri. Namun manfaat itu bergantung pada complementarities: logistik, pendidikan, institusi, energi, pembiayaan, standar, dan kemampuan perusahaan lokal. Keterbukaan yang tidak disertai kemampuan belajar dapat menghasilkan partisipasi dangkal. Sebaliknya, proteksi tanpa disiplin dapat menciptakan rente dan perusahaan yang tidak pernah kompetitif.

Dilema muncul karena reshoring agresif dapat mengurangi efisiensi dan justru memusatkan risiko di dalam negeri. Efisiensi dan ketahanan bukan dua kutub yang selalu bertentangan, tetapi memerlukan desain jaringan yang tepat. Inventori, multiple sourcing, modularity, visibility, dan hubungan pemasok jangka panjang dapat menambah resilience tanpa memindahkan seluruh produksi ke dalam negeri. Lokalisasi mungkin diperlukan bagi barang strategis tertentu, tetapi biaya peluangnya harus dihitung. Ketika semua sektor menyatakan diri strategis, kebijakan keamanan berubah menjadi proteksionisme permanen. Negara perlu membedakan ketergantungan biasa, ketergantungan terkonsentrasi, dan ketergantungan yang benar-benar mengancam fungsi esensial.

Karena itu, arah yang dianjurkan ialah mengukur ketergantungan kritis dan menambah opsi tanpa menghapus manfaat spesialisasi. Keberhasilan harus diukur melalui produktivitas, keragaman pemasok dan pasar, waktu pemulihan, ekspor bernilai tambah, kualitas pekerjaan, intensitas pengetahuan, emisi, serta kemampuan perusahaan domestik naik kelas. Nilai ekspor bruto tidak cukup bila input, teknologi, pembiayaan, dan laba utama tetap berasal dari luar. Jumlah investasi juga tidak cukup bila proyek menjadi

enclave. Scorecard perlu menilai domestic value added, local supplier development, R&D, keterampilan, transfer teknologi, dan hubungan dengan universitas maupun UMKM.

Pada akhirnya, mengukur ketergantungan kritis dan menambah opsi tanpa menghapus manfaat spesialisasi. Globalisasi baru harus dikelola sebagai interdependensi yang memiliki manfaat sekaligus risiko. Diversifikasi tidak berarti memutus hubungan; ketahanan tidak berarti autarki; kebijakan industri tidak berarti menutup persaingan; dan keamanan tidak boleh menjadi alasan tanpa batas. Indonesia memerlukan pilihan mitra, kemampuan domestik, aturan yang konsisten, serta mekanisme koreksi. Dengan fondasi tersebut, keterhubungan global dapat dipakai untuk mempercepat pembelajaran, menyebarkan peluang, menjaga stabilitas, dan mengarahkan perubahan teknologi serta ekologis kepada kesejahteraan masyarakat.

Kebangkitan Kebijakan Industri

Kembalinya subsidi, kredit pajak, local content, pembiayaan negara, dan misi teknologi pada semikonduktor, energi, pangan, serta pertahanan perlu ditempatkan dalam sejarah panjang globalisasi. Gelombang sebelumnya mengurangi biaya transportasi dan komunikasi, memecah proses produksi lintas negara, serta memperbesar peran perusahaan multinasional. Kini logika tersebut bertemu dengan konflik, pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan kebijakan keamanan. Arus lintas batas tetap besar, tetapi komposisi, tujuan, dan instrumennya berubah. Barang tertentu diproduksi lebih dekat, sementara jasa, data, modal intelektual, dan pekerjaan profesional justru semakin mudah bergerak. Karena itu satu indikator, seperti rasio perdagangan barang terhadap PDB, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa globalisasi sedang berakhir.

Secara ekonomi, kebijakan industri dapat mengatasi kegagalan koordinasi, membangun pembelajaran, dan mempercepat transisi. Integrasi memperluas pasar, memungkinkan spesialisasi, mempercepat difusi teknologi, dan memberi konsumen pilihan yang lebih besar. Perusahaan memperoleh input serta pengetahuan dari banyak lokasi; negara berkembang dapat masuk ke rantai nilai tanpa terlebih dahulu membangun seluruh industri. Namun manfaat itu bergantung pada complementarities: logistik, pendidikan, institusi, energi, pembiayaan, standar, dan kemampuan perusahaan lokal. Keterbukaan yang tidak disertai kemampuan belajar dapat menghasilkan partisipasi dangkal. Sebaliknya, proteksi tanpa disiplin dapat menciptakan rente dan perusahaan yang tidak pernah kompetitif.

Dilema muncul karena insentif dapat dibajak kepentingan, memicu perlombaan subsidi, dan mempertahankan perusahaan tidak produktif. Efisiensi dan ketahanan bukan dua kutub yang selalu bertentangan, tetapi memerlukan desain jaringan yang tepat. Inventori, multiple sourcing, modularity, visibility, dan hubungan pemasok jangka panjang dapat menambah resilience tanpa memindahkan seluruh produksi ke dalam negeri. Lokalisasi mungkin diperlukan bagi barang strategis tertentu, tetapi biaya peluangnya harus dihitung. Ketika semua sektor menyatakan diri strategis, kebijakan keamanan berubah menjadi proteksionisme permanen. Negara perlu membedakan ketergantungan biasa, ketergantungan terkonsentrasi, dan ketergantungan yang benar-benar mengancam fungsi esensial.

Karena itu, arah yang dianjurkan ialah mengikat dukungan pada kinerja, persaingan, sunset clause, spillover, dan evaluasi transparan. Keberhasilan harus diukur melalui produktivitas, keragaman pemasok dan pasar, waktu pemulihan, ekspor bernilai tambah, kualitas pekerjaan, intensitas pengetahuan, emisi, serta kemampuan perusahaan domestik naik kelas. Nilai ekspor bruto tidak cukup bila input, teknologi, pembiayaan, dan laba utama tetap berasal dari luar. Jumlah investasi juga tidak cukup bila proyek menjadi

enclave. Scorecard perlu menilai domestic value added, local supplier development, R&D, keterampilan, transfer teknologi, dan hubungan dengan universitas maupun UMKM.

Perang Teknologi dan Semikonduktor

Posisi chip, peralatan manufaktur, cloud, perangkat lunak desain, dan talenta sebagai chokepoint ekonomi modern perlu ditempatkan dalam sejarah panjang globalisasi. Gelombang sebelumnya mengurangi biaya transportasi dan komunikasi, memecah proses produksi lintas negara, serta memperbesar peran perusahaan multinasional. Kini logika tersebut bertemu dengan konflik, pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan kebijakan keamanan. Arus lintas batas tetap besar, tetapi komposisi, tujuan, dan instrumennya berubah. Barang tertentu diproduksi lebih dekat, sementara jasa, data, modal intelektual, dan pekerjaan profesional justru semakin mudah bergerak. Karena itu satu indikator, seperti rasio perdagangan barang terhadap PDB, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa globalisasi sedang berakhir.

Secara ekonomi, investasi baru membuka peluang diversifikasi lokasi, pemasok, desain, packaging, serta layanan. Integrasi memperluas pasar, memungkinkan spesialisasi, mempercepat difusi teknologi, dan memberi konsumen pilihan yang lebih besar. Perusahaan memperoleh input serta pengetahuan dari banyak lokasi; negara berkembang dapat masuk ke rantai nilai tanpa terlebih dahulu membangun seluruh industri. Namun manfaat itu bergantung pada complementarities: logistik, pendidikan, institusi, energi, pembiayaan, standar, dan kemampuan perusahaan lokal. Keterbukaan yang tidak disertai kemampuan belajar dapat menghasilkan partisipasi dangkal. Sebaliknya, proteksi tanpa disiplin dapat menciptakan rente dan perusahaan yang tidak pernah kompetitif.

Dilema muncul karena kontrol ekspor dan blok teknologi dapat memecah standar serta memperlambat difusi pengetahuan. Efisiensi dan ketahanan bukan dua kutub yang selalu bertentangan, tetapi memerlukan desain jaringan yang tepat. Inventori, multiple sourcing, modularity, visibility, dan hubungan pemasok jangka panjang dapat menambah resilience tanpa memindahkan seluruh produksi ke dalam negeri. Lokalisasi mungkin diperlukan bagi barang strategis tertentu, tetapi biaya peluangnya harus dihitung. Ketika semua sektor menyatakan diri strategis, kebijakan keamanan berubah menjadi proteksionisme permanen. Negara perlu membedakan ketergantungan biasa, ketergantungan terkonsentrasi, dan ketergantungan yang benar-benar mengancam fungsi esensial.

Karena itu, arah yang dianjurkan ialah membangun niche capabilities dan diplomasi teknologi yang menjaga ruang pilihan. Keberhasilan harus diukur melalui produktivitas, keragaman pemasok dan pasar, waktu pemulihan, ekspor bernilai tambah, kualitas pekerjaan, intensitas pengetahuan, emisi, serta kemampuan perusahaan domestik naik kelas. Nilai ekspor bruto tidak cukup bila input, teknologi, pembiayaan, dan laba utama tetap berasal dari luar. Jumlah investasi juga tidak cukup bila proyek menjadi enclave. Scorecard perlu menilai domestic value added, local supplier development, R&D, keterampilan, transfer teknologi, dan hubungan dengan universitas maupun UMKM.

Pada akhirnya, membangun niche capabilities dan diplomasi teknologi yang menjaga ruang pilihan. Globalisasi baru harus dikelola sebagai interdependensi yang memiliki manfaat sekaligus risiko. Diversifikasi tidak berarti memutus hubungan; ketahanan tidak berarti autarki; kebijakan industri tidak berarti menutup persaingan; dan keamanan tidak boleh menjadi alasan tanpa batas. Indonesia memerlukan pilihan mitra, kemampuan domestik, aturan yang konsisten, serta mekanisme koreksi. Dengan fondasi tersebut, keterhubungan global dapat dipakai untuk mempercepat pembelajaran,

menyebarkan peluang, menjaga stabilitas, dan mengarahkan perubahan teknologi serta ekologis kepada kesejahteraan masyarakat.

Digitalisasi Mengurangi Arti Jarak

Pertumbuhan perdagangan jasa digital, perangkat lunak, cloud, konten, pendidikan, konsultasi, dan kerja jarak jauh perlu ditempatkan dalam sejarah panjang globalisasi. Gelombang sebelumnya mengurangi biaya transportasi dan komunikasi, memecah proses produksi lintas negara, serta memperbesar peran perusahaan multinasional. Kini logika tersebut bertemu dengan konflik, pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan kebijakan keamanan. Arus lintas batas tetap besar, tetapi komposisi, tujuan, dan instrumennya berubah. Barang tertentu diproduksi lebih dekat, sementara jasa, data, modal intelektual, dan pekerjaan profesional justru semakin mudah bergerak. Karena itu satu indikator, seperti rasio perdagangan barang terhadap PDB, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa globalisasi sedang berakhir.

Secara ekonomi, perusahaan kecil dapat menjual kemampuan lintas batas tanpa logistik fisik yang mahal. Integrasi memperluas pasar, memungkinkan spesialisasi, mempercepat difusi teknologi, dan memberi konsumen pilihan yang lebih besar. Perusahaan memperoleh input serta pengetahuan dari banyak lokasi; negara berkembang dapat masuk ke rantai nilai tanpa terlebih dahulu membangun seluruh industri. Namun manfaat itu bergantung pada complementarities: logistik, pendidikan, institusi, energi, pembiayaan, standar, dan kemampuan perusahaan lokal. Keterbukaan yang tidak disertai kemampuan belajar dapat menghasilkan partisipasi dangkal. Sebaliknya, proteksi tanpa disiplin dapat menciptakan rente dan perusahaan yang tidak pernah kompetitif.

Dilema muncul karena kesenjangan konektivitas, pembayaran, bahasa, data, dan regulasi menciptakan bentuk ketimpangan baru. Efisiensi dan ketahanan bukan dua kutub yang selalu bertentangan, tetapi memerlukan desain jaringan yang tepat. Inventori, multiple sourcing, modularity, visibility, dan hubungan pemasok jangka panjang dapat menambah resilience tanpa memindahkan seluruh produksi ke dalam negeri. Lokalisasi mungkin diperlukan bagi barang strategis tertentu, tetapi biaya peluangnya harus dihitung. Ketika semua sektor menyatakan diri strategis, kebijakan keamanan berubah menjadi proteksionisme permanen. Negara perlu membedakan ketergantungan biasa, ketergantungan terkonsentrasi, dan ketergantungan yang benar-benar mengancam fungsi esensial.

Karena itu, arah yang dianjurkan ialah memperkuat infrastruktur digital, kepercayaan, keterampilan, interoperabilitas, dan perlindungan pekerja. Keberhasilan harus diukur melalui produktivitas, keragaman pemasok dan pasar, waktu pemulihan, ekspor bernilai tambah, kualitas pekerjaan, intensitas pengetahuan, emisi, serta kemampuan perusahaan domestik naik kelas. Nilai ekspor bruto tidak cukup bila input, teknologi, pembiayaan, dan laba utama tetap berasal dari luar. Jumlah investasi juga tidak cukup bila proyek menjadi enclave. Scorecard perlu menilai domestic value added, local supplier development, R&D, keterampilan, transfer teknologi, dan hubungan dengan universitas maupun UMKM.

AI sebagai Mesin Globalisasi Baru

Penggunaan kecerdasan artifisial untuk penerjemahan, desain, pencarian pemasok, kepatuhan, logistik, pemasaran, dan inovasi perlu ditempatkan dalam sejarah panjang globalisasi. Gelombang sebelumnya mengurangi biaya transportasi dan komunikasi, memecah proses produksi lintas negara, serta memperbesar peran perusahaan multinasional. Kini logika tersebut bertemu dengan konflik, pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan kebijakan keamanan. Arus lintas batas tetap besar, tetapi komposisi,

tujuan, dan instrumennya berubah. Barang tertentu diproduksi lebih dekat, sementara jasa, data, modal intelektual, dan pekerjaan profesional justru semakin mudah bergerak. Karena itu satu indikator, seperti rasio perdagangan barang terhadap PDB, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa globalisasi sedang berakhir.

Secara ekonomi, AI dapat menurunkan biaya masuk pasar serta membantu UMKM mengelola kompleksitas global. Integrasi memperluas pasar, memungkinkan spesialisasi, mempercepat difusi teknologi, dan memberi konsumen pilihan yang lebih besar. Perusahaan memperoleh input serta pengetahuan dari banyak lokasi; negara berkembang dapat masuk ke rantai nilai tanpa terlebih dahulu membangun seluruh industri. Namun manfaat itu bergantung pada complementarities: logistik, pendidikan, institusi, energi, pembiayaan, standar, dan kemampuan perusahaan lokal. Keterbukaan yang tidak disertai kemampuan belajar dapat menghasilkan partisipasi dangkal. Sebaliknya, proteksi tanpa disiplin dapat menciptakan rente dan perusahaan yang tidak pernah kompetitif.

Dilema muncul karena konsentrasi compute, model, data, dan platform dapat memperlebar kesenjangan antarnegara serta perusahaan. Efisiensi dan ketahanan bukan dua kutub yang selalu bertentangan, tetapi memerlukan desain jaringan yang tepat. Inventori, multiple sourcing, modularity, visibility, dan hubungan pemasok jangka panjang dapat menambah resilience tanpa memindahkan seluruh produksi ke dalam negeri. Lokalisasi mungkin diperlukan bagi barang strategis tertentu, tetapi biaya peluangnya harus dihitung. Ketika semua sektor menyatakan diri strategis, kebijakan keamanan berubah menjadi proteksionisme permanen. Negara perlu membedakan ketergantungan biasa, ketergantungan terkonsentrasi, dan ketergantungan yang benar-benar mengancam fungsi esensial.

Karena itu, arah yang dianjurkan ialah mendemokratisasi kapabilitas AI melalui compute, talenta, data lokal, persaingan, dan tata kelola. Keberhasilan harus diukur melalui produktivitas, keragaman pemasok dan pasar, waktu pemulihan, ekspor bernilai tambah, kualitas pekerjaan, intensitas pengetahuan, emisi, serta kemampuan perusahaan domestik naik kelas. Nilai ekspor bruto tidak cukup bila input, teknologi, pembiayaan, dan laba utama tetap berasal dari luar. Jumlah investasi juga tidak cukup bila proyek menjadi enclave. Scorecard perlu menilai domestic value added, local supplier development, R&D, keterampilan, transfer teknologi, dan hubungan dengan universitas maupun UMKM.

Pada akhirnya, mendemokratisasi kapabilitas AI melalui compute, talenta, data lokal, persaingan, dan tata kelola. Globalisasi baru harus dikelola sebagai interdependensi yang memiliki manfaat sekaligus risiko. Diversifikasi tidak berarti memutus hubungan; ketahanan tidak berarti autarki; kebijakan industri tidak berarti menutup persaingan; dan keamanan tidak boleh menjadi alasan tanpa batas. Indonesia memerlukan pilihan mitra, kemampuan domestik, aturan yang konsisten, serta mekanisme koreksi. Dengan fondasi tersebut, keterhubungan global dapat dipakai untuk mempercepat pembelajaran, menyebarkan peluang, menjaga stabilitas, dan mengarahkan perubahan teknologi serta ekologis kepada kesejahteraan masyarakat.

Platform Global dan Kekuasaan Perantara

Peran marketplace, app store, mesin pencari, media sosial, pembayaran, dan logistik dalam mengatur akses pasar perlu ditempatkan dalam sejarah panjang globalisasi. Gelombang sebelumnya mengurangi biaya transportasi dan komunikasi, memecah proses produksi lintas negara, serta memperbesar peran perusahaan multinasional. Kini logika tersebut bertemu dengan konflik, pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan kebijakan keamanan. Arus lintas batas tetap besar, tetapi komposisi, tujuan, dan instrumennya berubah. Barang tertentu diproduksi lebih dekat, sementara jasa, data, modal intelektual,

dan pekerjaan profesional justru semakin mudah bergerak. Karena itu satu indikator, seperti rasio perdagangan barang terhadap PDB, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa globalisasi sedang berakhir.

Secara ekonomi, platform mempertemukan produsen serta konsumen pada skala yang sebelumnya mustahil. Integrasi memperluas pasar, memungkinkan spesialisasi, mempercepat difusi teknologi, dan memberi konsumen pilihan yang lebih besar. Perusahaan memperoleh input serta pengetahuan dari banyak lokasi; negara berkembang dapat masuk ke rantai nilai tanpa terlebih dahulu membangun seluruh industri. Namun manfaat itu bergantung pada complementarities: logistik, pendidikan, institusi, energi, pembiayaan, standar, dan kemampuan perusahaan lokal. Keterbukaan yang tidak disertai kemampuan belajar dapat menghasilkan partisipasi dangkal. Sebaliknya, proteksi tanpa disiplin dapat menciptakan rente dan perusahaan yang tidak pernah kompetitif.

Dilema muncul karena ranking, komisi, self-preferencing, dan perubahan aturan sepihak menggeser kekuasaan dari produsen ke perantara. Efisiensi dan ketahanan bukan dua kutub yang selalu bertentangan, tetapi memerlukan desain jaringan yang tepat. Inventori, multiple sourcing, modularity, visibility, dan hubungan pemasok jangka panjang dapat menambah resilience tanpa memindahkan seluruh produksi ke dalam negeri. Lokalisasi mungkin diperlukan bagi barang strategis tertentu, tetapi biaya peluangnya harus dihitung. Ketika semua sektor menyatakan diri strategis, kebijakan keamanan berubah menjadi proteksionisme permanen. Negara perlu membedakan ketergantungan biasa, ketergantungan terkonsentrasi, dan ketergantungan yang benar-benar mengancam fungsi esensial.

Karena itu, arah yang dianjurkan ialah menjamin contestability, interoperabilitas, portabilitas, transparansi, dan due process. Keberhasilan harus diukur melalui produktivitas, keragaman pemasok dan pasar, waktu pemulihan, ekspor bernilai tambah, kualitas pekerjaan, intensitas pengetahuan, emisi, serta kemampuan perusahaan domestik naik kelas. Nilai ekspor bruto tidak cukup bila input, teknologi, pembiayaan, dan laba utama tetap berasal dari luar. Jumlah investasi juga tidak cukup bila proyek menjadi enclave. Scorecard perlu menilai domestic value added, local supplier development, R&D, keterampilan, transfer teknologi, dan hubungan dengan universitas maupun UMKM.

Transisi Hijau Mengubah Peta Perdagangan

Pengaruh dekarbonisasi, kendaraan listrik, energi terbarukan, carbon pricing, standar emisi, dan traceability perlu ditempatkan dalam sejarah panjang globalisasi. Gelombang sebelumnya mengurangi biaya transportasi dan komunikasi, memecah proses produksi lintas negara, serta memperbesar peran perusahaan multinasional. Kini logika tersebut bertemu dengan konflik, pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan kebijakan keamanan. Arus lintas batas tetap besar, tetapi komposisi, tujuan, dan instrumennya berubah. Barang tertentu diproduksi lebih dekat, sementara jasa, data, modal intelektual, dan pekerjaan profesional justru semakin mudah bergerak. Karena itu satu indikator, seperti rasio perdagangan barang terhadap PDB, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa globalisasi sedang berakhir.

Secara ekonomi, perdagangan dapat mempercepat difusi teknologi bersih dan menurunkan biaya transisi. Integrasi memperluas pasar, memungkinkan spesialisasi, mempercepat difusi teknologi, dan memberi konsumen pilihan yang lebih besar. Perusahaan memperoleh input serta pengetahuan dari banyak lokasi; negara berkembang dapat masuk ke rantai nilai tanpa terlebih dahulu membangun seluruh industri. Namun manfaat itu bergantung pada complementarities: logistik, pendidikan, institusi, energi, pembiayaan, standar, dan kemampuan perusahaan lokal. Keterbukaan yang tidak disertai kemampuan belajar dapat menghasilkan partisipasi dangkal. Sebaliknya, proteksi tanpa disiplin dapat menciptakan rente dan perusahaan yang tidak pernah kompetitif.

Dilema muncul karena green protectionism dan standar yang tidak kompatibel dapat meminggirkan negara berkembang. Efisiensi dan ketahanan bukan dua kutub yang selalu bertentangan, tetapi memerlukan desain jaringan yang tepat. Inventori, multiple sourcing, modularity, visibility, dan hubungan pemasok jangka panjang dapat menambah resilience tanpa memindahkan seluruh produksi ke dalam negeri. Lokalisasi mungkin diperlukan bagi barang strategis tertentu, tetapi biaya peluangnya harus dihitung. Ketika semua sektor menyatakan diri strategis, kebijakan keamanan berubah menjadi proteksionisme permanen. Negara perlu membedakan ketergantungan biasa, ketergantungan terkonsentrasi, dan ketergantungan yang benar-benar mengancam fungsi esensial.

Karena itu, arah yang dianjurkan ialah menyatukan industrial upgrading, kredibilitas lingkungan, pembiayaan, dan diplomasi standar. Keberhasilan harus diukur melalui produktivitas, keragaman pemasok dan pasar, waktu pemulihan, ekspor bernilai tambah, kualitas pekerjaan, intensitas pengetahuan, emisi, serta kemampuan perusahaan domestik naik kelas. Nilai ekspor bruto tidak cukup bila input, teknologi, pembiayaan, dan laba utama tetap berasal dari luar. Jumlah investasi juga tidak cukup bila proyek menjadi enclave. Scorecard perlu menilai domestic value added, local supplier development, R&D, keterampilan, transfer teknologi, dan hubungan dengan universitas maupun UMKM.

Pada akhirnya, menyatukan industrial upgrading, kredibilitas lingkungan, pembiayaan, dan diplomasi standar. Globalisasi baru harus dikelola sebagai interdependensi yang memiliki manfaat sekaligus risiko. Diversifikasi tidak berarti memutus hubungan; ketahanan tidak berarti autarki; kebijakan industri tidak berarti menutup persaingan; dan keamanan tidak boleh menjadi alasan tanpa batas. Indonesia memerlukan pilihan mitra, kemampuan domestik, aturan yang konsisten, serta mekanisme koreksi. Dengan fondasi tersebut, keterhubungan global dapat dipakai untuk mempercepat pembelajaran, menyebarkan peluang, menjaga stabilitas, dan mengarahkan perubahan teknologi serta ekologis kepada kesejahteraan masyarakat.

Mineral Kritis dan Nasionalisme Sumber Daya

Perebutan nikel, litium, tembaga, kobalt, rare earths, serta kapasitas pemrosesan untuk ekonomi rendah karbon perlu ditempatkan dalam sejarah panjang globalisasi. Gelombang sebelumnya mengurangi biaya transportasi dan komunikasi, memecah proses produksi lintas negara, serta memperbesar peran perusahaan multinasional. Kini logika tersebut bertemu dengan konflik, pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan kebijakan keamanan. Arus lintas batas tetap besar, tetapi komposisi, tujuan, dan instrumennya berubah. Barang tertentu diproduksi lebih dekat, sementara jasa, data, modal intelektual, dan pekerjaan profesional justru semakin mudah bergerak. Karena itu satu indikator, seperti rasio perdagangan barang terhadap PDB, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa globalisasi sedang berakhir.

Secara ekonomi, negara produsen memperoleh peluang hilirisasi, investasi, pekerjaan, dan posisi tawar. Integrasi memperluas pasar, memungkinkan spesialisasi, mempercepat difusi teknologi, dan memberi konsumen pilihan yang lebih besar. Perusahaan memperoleh input serta pengetahuan dari banyak lokasi; negara berkembang dapat masuk ke rantai nilai tanpa terlebih dahulu membangun seluruh industri. Namun manfaat itu bergantung pada complementarities: logistik, pendidikan, institusi, energi, pembiayaan, standar, dan kemampuan perusahaan lokal. Keterbukaan yang tidak disertai kemampuan belajar dapat menghasilkan partisipasi dangkal. Sebaliknya, proteksi tanpa disiplin dapat menciptakan rente dan perusahaan yang tidak pernah kompetitif.

Dilema muncul karena larangan ekspor tanpa ekosistem dapat menghasilkan enclave, kerusakan ekologis, serta ketergantungan teknologi baru. Efisiensi dan ketahanan bukan dua kutub yang selalu

bertentangan, tetapi memerlukan desain jaringan yang tepat. Inventori, multiple sourcing, modularity, visibility, dan hubungan pemasok jangka panjang dapat menambah resilience tanpa memindahkan seluruh produksi ke dalam negeri. Lokalisasi mungkin diperlukan bagi barang strategis tertentu, tetapi biaya peluangnya harus dihitung. Ketika semua sektor menyatakan diri strategis, kebijakan keamanan berubah menjadi proteksionisme permanen. Negara perlu membedakan ketergantungan biasa, ketergantungan terkonsentrasi, dan ketergantungan yang benar-benar mengancam fungsi esensial.

Karena itu, arah yang dianjurkan ialah mengukur nilai tambah domestik, transfer teknologi, energi bersih, dan pemulihan lingkungan. Keberhasilan harus diukur melalui produktivitas, keragaman pemasok dan pasar, waktu pemulihan, ekspor bernilai tambah, kualitas pekerjaan, intensitas pengetahuan, emisi, serta kemampuan perusahaan domestik naik kelas. Nilai ekspor bruto tidak cukup bila input, teknologi, pembiayaan, dan laba utama tetap berasal dari luar. Jumlah investasi juga tidak cukup bila proyek menjadi enclave. Scorecard perlu menilai domestic value added, local supplier development, R&D, keterampilan, transfer teknologi, dan hubungan dengan universitas maupun UMKM.

Perdagangan, Pangan, dan Energi dalam Dunia Rentan

Keterkaitan konflik, cuaca ekstrem, jalur pelayaran, pupuk, komoditas, stok, dan harga konsumen perlu ditempatkan dalam sejarah panjang globalisasi. Gelombang sebelumnya mengurangi biaya transportasi dan komunikasi, memecah proses produksi lintas negara, serta memperbesar peran perusahaan multinasional. Kini logika tersebut bertemu dengan konflik, pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan kebijakan keamanan. Arus lintas batas tetap besar, tetapi komposisi, tujuan, dan instrumennya berubah. Barang tertentu diproduksi lebih dekat, sementara jasa, data, modal intelektual, dan pekerjaan profesional justru semakin mudah bergerak. Karena itu satu indikator, seperti rasio perdagangan barang terhadap PDB, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa globalisasi sedang berakhir.

Secara ekonomi, perdagangan yang terbuka memungkinkan wilayah surplus menolong wilayah yang mengalami kekurangan. Integrasi memperluas pasar, memungkinkan spesialisasi, mempercepat difusi teknologi, dan memberi konsumen pilihan yang lebih besar. Perusahaan memperoleh input serta pengetahuan dari banyak lokasi; negara berkembang dapat masuk ke rantai nilai tanpa terlebih dahulu membangun seluruh industri. Namun manfaat itu bergantung pada complementarities: logistik, pendidikan, institusi, energi, pembiayaan, standar, dan kemampuan perusahaan lokal. Keterbukaan yang tidak disertai kemampuan belajar dapat menghasilkan partisipasi dangkal. Sebaliknya, proteksi tanpa disiplin dapat menciptakan rente dan perusahaan yang tidak pernah kompetitif.

Dilema muncul karena konsentrasi pemasok, pembatasan ekspor, serta gangguan logistik memperbesar inflasi dan kerawanan. Efisiensi dan ketahanan bukan dua kutub yang selalu bertentangan, tetapi memerlukan desain jaringan yang tepat. Inventori, multiple sourcing, modularity, visibility, dan hubungan pemasok jangka panjang dapat menambah resilience tanpa memindahkan seluruh produksi ke dalam negeri. Lokalisasi mungkin diperlukan bagi barang strategis tertentu, tetapi biaya peluangnya harus dihitung. Ketika semua sektor menyatakan diri strategis, kebijakan keamanan berubah menjadi proteksionisme permanen. Negara perlu membedakan ketergantungan biasa, ketergantungan terkonsentrasi, dan ketergantungan yang benar-benar mengancam fungsi esensial.

Karena itu, arah yang dianjurkan ialah membangun cadangan cerdas, sumber beragam, transparansi pasar, dan perlindungan kelompok rentan. Keberhasilan harus diukur melalui produktivitas, keragaman pemasok dan pasar, waktu pemulihan, ekspor bernilai tambah, kualitas pekerjaan, intensitas pengetahuan, emisi, serta kemampuan perusahaan domestik naik kelas. Nilai ekspor bruto tidak cukup

bila input, teknologi, pembiayaan, dan laba utama tetap berasal dari luar. Jumlah investasi juga tidak cukup bila proyek menjadi enclave. Scorecard perlu menilai domestic value added, local supplier development, R&D, keterampilan, transfer teknologi, dan hubungan dengan universitas maupun UMKM.

Pada akhirnya, membangun cadangan cerdas, sumber beragam, transparansi pasar, dan perlindungan kelompok rentan. Globalisasi baru harus dikelola sebagai interdependensi yang memiliki manfaat sekaligus risiko. Diversifikasi tidak berarti memutus hubungan; ketahanan tidak berarti autarki; kebijakan industri tidak berarti menutup persaingan; dan keamanan tidak boleh menjadi alasan tanpa batas. Indonesia memerlukan pilihan mitra, kemampuan domestik, aturan yang konsisten, serta mekanisme koreksi. Dengan fondasi tersebut, keterhubungan global dapat dipakai untuk mempercepat pembelajaran, menyebarkan peluang, menjaga stabilitas, dan mengarahkan perubahan teknologi serta ekologis kepada kesejahteraan masyarakat.

Keuangan Global yang Lebih Terfragmentasi

Perubahan aliran investasi, risiko sanksi, mata uang, sistem pembayaran, utang, dan premi geopolitik perlu ditempatkan dalam sejarah panjang globalisasi. Gelombang sebelumnya mengurangi biaya transportasi dan komunikasi, memecah proses produksi lintas negara, serta memperbesar peran perusahaan multinasional. Kini logika tersebut bertemu dengan konflik, pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan kebijakan keamanan. Arus lintas batas tetap besar, tetapi komposisi, tujuan, dan instrumennya berubah. Barang tertentu diproduksi lebih dekat, sementara jasa, data, modal intelektual, dan pekerjaan profesional justru semakin mudah bergerak. Karena itu satu indikator, seperti rasio perdagangan barang terhadap PDB, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa globalisasi sedang berakhir.

Secara ekonomi, modal lintas batas tetap dapat membiayai inovasi, infrastruktur, serta transisi pembangunan. Integrasi memperluas pasar, memungkinkan spesialisasi, mempercepat difusi teknologi, dan memberi konsumen pilihan yang lebih besar. Perusahaan memperoleh input serta pengetahuan dari banyak lokasi; negara berkembang dapat masuk ke rantai nilai tanpa terlebih dahulu membangun seluruh industri. Namun manfaat itu bergantung pada complementarities: logistik, pendidikan, institusi, energi, pembiayaan, standar, dan kemampuan perusahaan lokal. Keterbukaan yang tidak disertai kemampuan belajar dapat menghasilkan partisipasi dangkal. Sebaliknya, proteksi tanpa disiplin dapat menciptakan rente dan perusahaan yang tidak pernah kompetitif.

Dilema muncul karena sudden stop, financial decoupling, dan pembiayaan mahal mempersempit ruang negara berkembang. Efisiensi dan ketahanan bukan dua kutub yang selalu bertentangan, tetapi memerlukan desain jaringan yang tepat. Inventori, multiple sourcing, modularity, visibility, dan hubungan pemasok jangka panjang dapat menambah resilience tanpa memindahkan seluruh produksi ke dalam negeri. Lokalisasi mungkin diperlukan bagi barang strategis tertentu, tetapi biaya peluangnya harus dihitung. Ketika semua sektor menyatakan diri strategis, kebijakan keamanan berubah menjadi proteksionisme permanen. Negara perlu membedakan ketergantungan biasa, ketergantungan terkonsentrasi, dan ketergantungan yang benar-benar mengancam fungsi esensial.

Karena itu, arah yang dianjurkan ialah memperkuat stabilitas makro, pasar domestik, jaring pengaman regional, dan kualitas proyek. Keberhasilan harus diukur melalui produktivitas, keragaman pemasok dan pasar, waktu pemulihan, ekspor bernilai tambah, kualitas pekerjaan, intensitas pengetahuan, emisi, serta kemampuan perusahaan domestik naik kelas. Nilai ekspor bruto tidak cukup bila input, teknologi, pembiayaan, dan laba utama tetap berasal dari luar. Jumlah investasi juga tidak cukup bila proyek menjadi

enclave. Scorecard perlu menilai domestic value added, local supplier development, R&D, keterampilan, transfer teknologi, dan hubungan dengan universitas maupun UMKM.

Mobilitas Manusia dan Globalisasi Talenta

Arus pekerja migran, mahasiswa, diaspora, profesional digital, dan mobilitas pengetahuan lintas negara perlu ditempatkan dalam sejarah panjang globalisasi. Gelombang sebelumnya mengurangi biaya transportasi dan komunikasi, memecah proses produksi lintas negara, serta memperbesar peran perusahaan multinasional. Kini logika tersebut bertemu dengan konflik, pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan kebijakan keamanan. Arus lintas batas tetap besar, tetapi komposisi, tujuan, dan instrumennya berubah. Barang tertentu diproduksi lebih dekat, sementara jasa, data, modal intelektual, dan pekerjaan profesional justru semakin mudah bergerak. Karena itu satu indikator, seperti rasio perdagangan barang terhadap PDB, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa globalisasi sedang berakhir.

Secara ekonomi, mobilitas memperluas pendapatan, remitansi, pembelajaran, jejaring, serta difusi keterampilan. Integrasi memperluas pasar, memungkinkan spesialisasi, mempercepat difusi teknologi, dan memberi konsumen pilihan yang lebih besar. Perusahaan memperoleh input serta pengetahuan dari banyak lokasi; negara berkembang dapat masuk ke rantai nilai tanpa terlebih dahulu membangun seluruh industri. Namun manfaat itu bergantung pada complementarities: logistik, pendidikan, institusi, energi, pembiayaan, standar, dan kemampuan perusahaan lokal. Keterbukaan yang tidak disertai kemampuan belajar dapat menghasilkan partisipasi dangkal. Sebaliknya, proteksi tanpa disiplin dapat menciptakan rente dan perusahaan yang tidak pernah kompetitif.

Dilema muncul karena brain drain, eksploitasi, diskriminasi, dan rezim visa yang selektif dapat memperbesar ketimpangan. Efisiensi dan ketahanan bukan dua kutub yang selalu bertentangan, tetapi memerlukan desain jaringan yang tepat. Inventori, multiple sourcing, modularity, visibility, dan hubungan pemasok jangka panjang dapat menambah resilience tanpa memindahkan seluruh produksi ke dalam negeri. Lokalisasi mungkin diperlukan bagi barang strategis tertentu, tetapi biaya peluangnya harus dihitung. Ketika semua sektor menyatakan diri strategis, kebijakan keamanan berubah menjadi proteksionisme permanen. Negara perlu membedakan ketergantungan biasa, ketergantungan terkonsentrasi, dan ketergantungan yang benar-benar mengancam fungsi esensial.

Karena itu, arah yang dianjurkan ialah mendorong mobilitas sirkular, perlindungan pekerja, pengakuan kompetensi, dan keterlibatan diaspora. Keberhasilan harus diukur melalui produktivitas, keragaman pemasok dan pasar, waktu pemulihan, ekspor bernilai tambah, kualitas pekerjaan, intensitas pengetahuan, emisi, serta kemampuan perusahaan domestik naik kelas. Nilai ekspor bruto tidak cukup bila input, teknologi, pembiayaan, dan laba utama tetap berasal dari luar. Jumlah investasi juga tidak cukup bila proyek menjadi enclave. Scorecard perlu menilai domestic value added, local supplier development, R&D, keterampilan, transfer teknologi, dan hubungan dengan universitas maupun UMKM.

Pada akhirnya, mendorong mobilitas sirkular, perlindungan pekerja, pengakuan kompetensi, dan keterlibatan diaspora. Globalisasi baru harus dikelola sebagai interdependensi yang memiliki manfaat sekaligus risiko. Diversifikasi tidak berarti memutus hubungan; ketahanan tidak berarti autarki; kebijakan industri tidak berarti menutup persaingan; dan keamanan tidak boleh menjadi alasan tanpa batas. Indonesia memerlukan pilihan mitra, kemampuan domestik, aturan yang konsisten, serta mekanisme koreksi. Dengan fondasi tersebut, keterhubungan global dapat dipakai untuk mempercepat pembelajaran, menyebarkan peluang, menjaga stabilitas, dan mengarahkan perubahan teknologi serta ekologis kepada kesejahteraan masyarakat.

Ketimpangan dan Kontrak Sosial Globalisasi

Distribusi manfaat perdagangan serta teknologi di antara negara, wilayah, perusahaan, pekerja, dan generasi perlu ditempatkan dalam sejarah panjang globalisasi. Gelombang sebelumnya mengurangi biaya transportasi dan komunikasi, memecah proses produksi lintas negara, serta memperbesar peran perusahaan multinasional. Kini logika tersebut bertemu dengan konflik, pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan kebijakan keamanan. Arus lintas batas tetap besar, tetapi komposisi, tujuan, dan instrumennya berubah. Barang tertentu diproduksi lebih dekat, sementara jasa, data, modal intelektual, dan pekerjaan profesional justru semakin mudah bergerak. Karena itu satu indikator, seperti rasio perdagangan barang terhadap PDB, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa globalisasi sedang berakhir.

Secara ekonomi, integrasi dapat meningkatkan produktivitas dan menyediakan barang, pasar, serta pengetahuan yang lebih luas. Integrasi memperluas pasar, memungkinkan spesialisasi, mempercepat difusi teknologi, dan memberi konsumen pilihan yang lebih besar. Perusahaan memperoleh input serta pengetahuan dari banyak lokasi; negara berkembang dapat masuk ke rantai nilai tanpa terlebih dahulu membangun seluruh industri. Namun manfaat itu bergantung pada complementarities: logistik, pendidikan, institusi, energi, pembiayaan, standar, dan kemampuan perusahaan lokal. Keterbukaan yang tidak disertai kemampuan belajar dapat menghasilkan partisipasi dangkal. Sebaliknya, proteksi tanpa disiplin dapat menciptakan rente dan perusahaan yang tidak pernah kompetitif.

Dilema muncul karena biaya penyesuaian terkonsentrasi pada komunitas tertentu sementara manfaat tersebar dan kurang terlihat. Efisiensi dan ketahanan bukan dua kutub yang selalu bertentangan, tetapi memerlukan desain jaringan yang tepat. Inventori, multiple sourcing, modularity, visibility, dan hubungan pemasok jangka panjang dapat menambah resilience tanpa memindahkan seluruh produksi ke dalam negeri. Lokalisasi mungkin diperlukan bagi barang strategis tertentu, tetapi biaya peluangnya harus dihitung. Ketika semua sektor menyatakan diri strategis, kebijakan keamanan berubah menjadi proteksionisme permanen. Negara perlu membedakan ketergantungan biasa, ketergantungan terkonsentrasi, dan ketergantungan yang benar-benar mengancam fungsi esensial.

Karena itu, arah yang dianjurkan ialah menggabungkan keterbukaan dengan pendidikan, perlindungan sosial, place-based policy, dan daya tawar pekerja. Keberhasilan harus diukur melalui produktivitas, keragaman pemasok dan pasar, waktu pemulihan, ekspor bernilai tambah, kualitas pekerjaan, intensitas pengetahuan, emisi, serta kemampuan perusahaan domestik naik kelas. Nilai ekspor bruto tidak cukup bila input, teknologi, pembiayaan, dan laba utama tetap berasal dari luar. Jumlah investasi juga tidak cukup bila proyek menjadi enclave. Scorecard perlu menilai domestic value added, local supplier development, R&D, keterampilan, transfer teknologi, dan hubungan dengan universitas maupun UMKM.

ASEAN di Tengah Kompetisi Blok

Posisi Asia Tenggara sebagai pasar, basis produksi, konektor, dan arena persaingan Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, serta kekuatan lain perlu ditempatkan dalam sejarah panjang globalisasi. Gelombang sebelumnya mengurangi biaya transportasi dan komunikasi, memecah proses produksi lintas negara, serta memperbesar peran perusahaan multinasional. Kini logika tersebut bertemu dengan konflik, pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan kebijakan keamanan. Arus lintas batas tetap besar, tetapi komposisi, tujuan, dan instrumennya berubah. Barang tertentu diproduksi lebih dekat, sementara jasa, data, modal intelektual, dan pekerjaan profesional justru semakin mudah bergerak. Karena itu satu

indikator, seperti rasio perdagangan barang terhadap PDB, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa globalisasi sedang berakhir.

Secara ekonomi, ASEAN dapat menangkap diversifikasi investasi dan memperkuat skala melalui integrasi kawasan. Integrasi memperluas pasar, memungkinkan spesialisasi, mempercepat difusi teknologi, dan memberi konsumen pilihan yang lebih besar. Perusahaan memperoleh input serta pengetahuan dari banyak lokasi; negara berkembang dapat masuk ke rantai nilai tanpa terlebih dahulu membangun seluruh industri. Namun manfaat itu bergantung pada complementarities: logistik, pendidikan, institusi, energi, pembiayaan, standar, dan kemampuan perusahaan lokal. Keterbukaan yang tidak disertai kemampuan belajar dapat menghasilkan partisipasi dangkal. Sebaliknya, proteksi tanpa disiplin dapat menciptakan rente dan perusahaan yang tidak pernah kompetitif.

Dilema muncul karena kompetisi standar dan tekanan memilih pihak dapat memecah sentralitas serta rantai pasok kawasan. Efisiensi dan ketahanan bukan dua kutub yang selalu bertentangan, tetapi memerlukan desain jaringan yang tepat. Inventori, multiple sourcing, modularity, visibility, dan hubungan pemasok jangka panjang dapat menambah resilience tanpa memindahkan seluruh produksi ke dalam negeri. Lokalisasi mungkin diperlukan bagi barang strategis tertentu, tetapi biaya peluangnya harus dihitung. Ketika semua sektor menyatakan diri strategis, kebijakan keamanan berubah menjadi proteksionisme permanen. Negara perlu membedakan ketergantungan biasa, ketergantungan terkonsentrasi, dan ketergantungan yang benar-benar mengancam fungsi esensial.

Karena itu, arah yang dianjurkan ialah memperdalam integrasi, interoperabilitas, rule-making, konektivitas, dan otonomi strategis. Keberhasilan harus diukur melalui produktivitas, keragaman pemasok dan pasar, waktu pemulihan, ekspor bernilai tambah, kualitas pekerjaan, intensitas pengetahuan, emisi, serta kemampuan perusahaan domestik naik kelas. Nilai ekspor bruto tidak cukup bila input, teknologi, pembiayaan, dan laba utama tetap berasal dari luar. Jumlah investasi juga tidak cukup bila proyek menjadi enclave. Scorecard perlu menilai domestic value added, local supplier development, R&D, keterampilan, transfer teknologi, dan hubungan dengan universitas maupun UMKM.

Pada akhirnya, memperdalam integrasi, interoperabilitas, rule-making, konektivitas, dan otonomi strategis. Globalisasi baru harus dikelola sebagai interdependensi yang memiliki manfaat sekaligus risiko. Diversifikasi tidak berarti memutus hubungan; ketahanan tidak berarti autarki; kebijakan industri tidak berarti menutup persaingan; dan keamanan tidak boleh menjadi alasan tanpa batas. Indonesia memerlukan pilihan mitra, kemampuan domestik, aturan yang konsisten, serta mekanisme koreksi. Dengan fondasi tersebut, keterhubungan global dapat dipakai untuk mempercepat pembelajaran, menyebarkan peluang, menjaga stabilitas, dan mengarahkan perubahan teknologi serta ekologis kepada kesejahteraan masyarakat.

Indonesia sebagai Negara Konektor

Kemampuan Indonesia menghubungkan sumber daya, manufaktur, pasar domestik, ekonomi digital, dan diplomasi global south perlu ditempatkan dalam sejarah panjang globalisasi. Gelombang sebelumnya mengurangi biaya transportasi dan komunikasi, memecah proses produksi lintas negara, serta memperbesar peran perusahaan multinasional. Kini logika tersebut bertemu dengan konflik, pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan kebijakan keamanan. Arus lintas batas tetap besar, tetapi komposisi, tujuan, dan instrumennya berubah. Barang tertentu diproduksi lebih dekat, sementara jasa, data, modal intelektual, dan pekerjaan profesional justru semakin mudah bergerak. Karena itu satu indikator, seperti

rasio perdagangan barang terhadap PDB, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa globalisasi sedang berakhir.

Secara ekonomi, posisi non-blok dan pasar besar memberi peluang menarik investasi dari beragam mitra. Integrasi memperluas pasar, memungkinkan spesialisasi, mempercepat difusi teknologi, dan memberi konsumen pilihan yang lebih besar. Perusahaan memperoleh input serta pengetahuan dari banyak lokasi; negara berkembang dapat masuk ke rantai nilai tanpa terlebih dahulu membangun seluruh industri. Namun manfaat itu bergantung pada complementarities: logistik, pendidikan, institusi, energi, pembiayaan, standar, dan kemampuan perusahaan lokal. Keterbukaan yang tidak disertai kemampuan belajar dapat menghasilkan partisipasi dangkal. Sebaliknya, proteksi tanpa disiplin dapat menciptakan rente dan perusahaan yang tidak pernah kompetitif.

Dilema muncul karena manfaat konektor dapat dangkal bila hanya berupa transshipment, perakitan, atau ekstraksi sumber daya. Efisiensi dan ketahanan bukan dua kutub yang selalu bertentangan, tetapi memerlukan desain jaringan yang tepat. Inventori, multiple sourcing, modularity, visibility, dan hubungan pemasok jangka panjang dapat menambah resilience tanpa memindahkan seluruh produksi ke dalam negeri. Lokalisasi mungkin diperlukan bagi barang strategis tertentu, tetapi biaya peluangnya harus dihitung. Ketika semua sektor menyatakan diri strategis, kebijakan keamanan berubah menjadi proteksionisme permanen. Negara perlu membedakan ketergantungan biasa, ketergantungan terkonsentrasi, dan ketergantungan yang benar-benar mengancam fungsi esensial.

Karena itu, arah yang dianjurkan ialah mengubah konektivitas menjadi upgrading teknologi, pemasok lokal, ekspor jasa, dan produktivitas. Keberhasilan harus diukur melalui produktivitas, keragaman pemasok dan pasar, waktu pemulihan, ekspor bernilai tambah, kualitas pekerjaan, intensitas pengetahuan, emisi, serta kemampuan perusahaan domestik naik kelas. Nilai ekspor bruto tidak cukup bila input, teknologi, pembiayaan, dan laba utama tetap berasal dari luar. Jumlah investasi juga tidak cukup bila proyek menjadi enclave. Scorecard perlu menilai domestic value added, local supplier development, R&D, keterampilan, transfer teknologi, dan hubungan dengan universitas maupun UMKM.

Peta Jalan Indonesia 2045

Strategi jangka panjang untuk produktivitas, hilirisasi cerdas, jasa digital, transisi hijau, logistik, talenta, serta institusi perlu ditempatkan dalam sejarah panjang globalisasi. Gelombang sebelumnya mengurangi biaya transportasi dan komunikasi, memecah proses produksi lintas negara, serta memperbesar peran perusahaan multinasional. Kini logika tersebut bertemu dengan konflik, pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan kebijakan keamanan. Arus lintas batas tetap besar, tetapi komposisi, tujuan, dan instrumennya berubah. Barang tertentu diproduksi lebih dekat, sementara jasa, data, modal intelektual, dan pekerjaan profesional justru semakin mudah bergerak. Karena itu satu indikator, seperti rasio perdagangan barang terhadap PDB, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa globalisasi sedang berakhir.

Secara ekonomi, konsistensi tujuan memungkinkan investasi dan pembelajaran melampaui siklus komoditas maupun politik. Integrasi memperluas pasar, memungkinkan spesialisasi, mempercepat difusi teknologi, dan memberi konsumen pilihan yang lebih besar. Perusahaan memperoleh input serta pengetahuan dari banyak lokasi; negara berkembang dapat masuk ke rantai nilai tanpa terlebih dahulu membangun seluruh industri. Namun manfaat itu bergantung pada complementarities: logistik, pendidikan, institusi, energi, pembiayaan, standar, dan kemampuan perusahaan lokal. Keterbukaan yang tidak disertai kemampuan belajar dapat menghasilkan partisipasi dangkal. Sebaliknya, proteksi tanpa disiplin dapat menciptakan rente dan perusahaan yang tidak pernah kompetitif.

Dilema muncul karena daftar proyek tanpa prioritas dan indikator dapat menghabiskan sumber daya tanpa transformasi struktural. Efisiensi dan ketahanan bukan dua kutub yang selalu bertentangan, tetapi memerlukan desain jaringan yang tepat. Inventori, multiple sourcing, modularity, visibility, dan hubungan pemasok jangka panjang dapat menambah resilience tanpa memindahkan seluruh produksi ke dalam negeri. Lokalisasi mungkin diperlukan bagi barang strategis tertentu, tetapi biaya peluangnya harus dihitung. Ketika semua sektor menyatakan diri strategis, kebijakan keamanan berubah menjadi proteksionisme permanen. Negara perlu membedakan ketergantungan biasa, ketergantungan terkonsentrasi, dan ketergantungan yang benar-benar mengancam fungsi esensial.

Karena itu, arah yang dianjurkan ialah menggunakan scorecard ketahanan, kompleksitas, nilai tambah domestik, inklusi, dan keberlanjutan. Keberhasilan harus diukur melalui produktivitas, keragaman pemasok dan pasar, waktu pemulihan, ekspor bernilai tambah, kualitas pekerjaan, intensitas pengetahuan, emisi, serta kemampuan perusahaan domestik naik kelas. Nilai ekspor bruto tidak cukup bila input, teknologi, pembiayaan, dan laba utama tetap berasal dari luar. Jumlah investasi juga tidak cukup bila proyek menjadi enclave. Scorecard perlu menilai domestic value added, local supplier development, R&D, keterampilan, transfer teknologi, dan hubungan dengan universitas maupun UMKM.

Pada akhirnya, menggunakan scorecard ketahanan, kompleksitas, nilai tambah domestik, inklusi, dan keberlanjutan. Globalisasi baru harus dikelola sebagai interdependensi yang memiliki manfaat sekaligus risiko. Diversifikasi tidak berarti memutus hubungan; ketahanan tidak berarti autarki; kebijakan industri tidak berarti menutup persaingan; dan keamanan tidak boleh menjadi alasan tanpa batas. Indonesia memerlukan pilihan mitra, kemampuan domestik, aturan yang konsisten, serta mekanisme koreksi. Dengan fondasi tersebut, keterhubungan global dapat dipakai untuk mempercepat pembelajaran, menyebarkan peluang, menjaga stabilitas, dan mengarahkan perubahan teknologi serta ekologis kepada kesejahteraan masyarakat.

Penutup: Mengelola Interdependensi

Visi globalisasi baru yang lebih berlapis, digital, hijau, regional, berisiko, dan dipengaruhi negara perlu ditempatkan dalam sejarah panjang globalisasi. Gelombang sebelumnya mengurangi biaya transportasi dan komunikasi, memecah proses produksi lintas negara, serta memperbesar peran perusahaan multinasional. Kini logika tersebut bertemu dengan konflik, pandemi, perubahan iklim, digitalisasi, dan kebijakan keamanan. Arus lintas batas tetap besar, tetapi komposisi, tujuan, dan instrumennya berubah. Barang tertentu diproduksi lebih dekat, sementara jasa, data, modal intelektual, dan pekerjaan profesional justru semakin mudah bergerak. Karena itu satu indikator, seperti rasio perdagangan barang terhadap PDB, tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa globalisasi sedang berakhir.

Secara ekonomi, interdependensi yang dikelola dapat tetap menjadi sumber perdamaian, inovasi, dan kemakmuran. Integrasi memperluas pasar, memungkinkan spesialisasi, mempercepat difusi teknologi, dan memberi konsumen pilihan yang lebih besar. Perusahaan memperoleh input serta pengetahuan dari banyak lokasi; negara berkembang dapat masuk ke rantai nilai tanpa terlebih dahulu membangun seluruh industri. Namun manfaat itu bergantung pada complementarities: logistik, pendidikan, institusi, energi, pembiayaan, standar, dan kemampuan perusahaan lokal. Keterbukaan yang tidak disertai kemampuan belajar dapat menghasilkan partisipasi dangkal. Sebaliknya, proteksi tanpa disiplin dapat menciptakan rente dan perusahaan yang tidak pernah kompetitif.

Dilema muncul karena nostalgia terhadap hyperglobalization maupun dorongan autarki sama-sama mengabaikan realitas jaringan. Efisiensi dan ketahanan bukan dua kutub yang selalu bertentangan, tetapi

memerlukan desain jaringan yang tepat. Inventori, multiple sourcing, modularity, visibility, dan hubungan pemasok jangka panjang dapat menambah resilience tanpa memindahkan seluruh produksi ke dalam negeri. Lokalisasi mungkin diperlukan bagi barang strategis tertentu, tetapi biaya peluangnya harus dihitung. Ketika semua sektor menyatakan diri strategis, kebijakan keamanan berubah menjadi proteksionisme permanen. Negara perlu membedakan ketergantungan biasa, ketergantungan terkonsentrasi, dan ketergantungan yang benar-benar mengancam fungsi esensial.

Karena itu, arah yang dianjurkan ialah membangun keterbukaan strategis yang tangguh, inklusif, demokratis, dan berkelanjutan. Keberhasilan harus diukur melalui produktivitas, keragaman pemasok dan pasar, waktu pemulihan, ekspor bernilai tambah, kualitas pekerjaan, intensitas pengetahuan, emisi, serta kemampuan perusahaan domestik naik kelas. Nilai ekspor bruto tidak cukup bila input, teknologi, pembiayaan, dan laba utama tetap berasal dari luar. Jumlah investasi juga tidak cukup bila proyek menjadi enclave. Scorecard perlu menilai domestic value added, local supplier development, R&D, keterampilan, transfer teknologi, dan hubungan dengan universitas maupun UMKM.

Agenda Strategis Indonesia dalam Globalisasi Baru

Pertama, Indonesia perlu memiliki peta ketergantungan strategis yang diperbarui secara berkala. Peta mencakup pangan, energi, obat, mineral, pupuk, semikonduktor, mesin, perangkat lunak, pembayaran, logistik, serta pembiayaan. Setiap ketergantungan dinilai menurut konsentrasi pemasok, substitusi, lead time, kepentingan sosial, dan biaya gangguan. Tujuannya bukan membuat semua barang sendiri, melainkan mengetahui titik rapuh serta opsi respons. Data ini menjadi dasar cadangan, diversifikasi, diplomasi, investasi, dan kerja sama kawasan.

Kedua, kebijakan industri perlu memakai portofolio misi yang terbatas dan terukur. Prioritas dipilih berdasarkan peluang pembelajaran, keterkaitan pemasok, permintaan masa depan, keunggulan Indonesia, dan manfaat publik. Dukungan dapat berupa infrastruktur, pembiayaan, riset, pengadaan, standarisasi, atau insentif, tetapi harus memiliki target produktivitas, ekspor, R&D, pekerjaan, emisi, dan local supplier development. Sunset clause serta evaluasi independen memastikan kebijakan tidak berubah menjadi perlindungan tanpa batas.

Ketiga, hilirisasi perlu bergerak dari pemrosesan komoditas menuju ekosistem pengetahuan. Investasi smelter atau pabrik awal harus dihubungkan dengan material maju, rekayasa, desain, jasa industri, pemeliharaan, daur ulang, serta penelitian. Kontrak dan insentif mendorong transfer kemampuan yang dapat diverifikasi. Energi bersih, keselamatan, traceability, dan pemulihan ekologis menjadi syarat daya saing. Ukuran utama bukan tonase atau ekspor bruto, tetapi nilai tambah domestik, produktivitas, kompleksitas, dan kualitas keterkaitan lokal.

Keempat, integrasi ASEAN perlu diperdalam sebagai fondasi skala dan ketahanan. Indonesia dapat mendorong konektivitas pelabuhan, harmonisasi prosedur, mutual recognition, pembayaran regional, interoperabilitas data, mobilitas talenta, serta jaringan energi. Integrasi kawasan tidak boleh berhenti pada penurunan tarif; ia harus mengurangi biaya logistik dan regulasi yang nyata. ASEAN yang lebih terhubung memiliki posisi tawar lebih besar terhadap kekuatan besar serta lebih mampu menyerap relokasi rantai nilai secara produktif.

Kelima, strategi perdagangan jasa digital harus menjadi prioritas setara dengan manufaktur. Indonesia perlu memperkuat konektivitas, cloud, keamanan siber, data governance, pembayaran, bahasa, sertifikasi profesi, dan perlindungan pekerja platform. Universitas serta politeknik dihubungkan dengan perusahaan

ekspor jasa. Insentif tidak hanya mengejar unicorn, tetapi juga perusahaan menengah yang menjual software, desain, animasi, engineering, health services, education, serta business processes. Jasa digital memberi jalur upgrading yang tidak dibatasi biaya logistik kepulauan.

Keenam, strategi AI perlu dipadukan dengan perdagangan dan produktivitas. Shared compute, data bahasa, pusat evaluasi, talenta, serta dukungan adopsi membantu UMKM dan pemasok menggunakan AI untuk desain, kualitas, compliance, penerjemahan, dan pemasaran. Pengadaan publik dapat menciptakan use cases lokal. Pada saat yang sama, persaingan, portabilitas, keamanan, hak cipta, dan perlindungan data mencegah ketergantungan baru. AI harus memperbesar kemampuan ekspor, bukan hanya konsumsi aplikasi asing.

Ketujuh, logistik nasional perlu dilihat sebagai infrastruktur globalisasi. Pelabuhan, kapal, kereta, jalan, gudang, cold chain, customs, single window, dan data harus beroperasi sebagai satu sistem. Indikatornya adalah reliability, dwell time, variability, biaya antarpulau, traceability, dan emisi. Investasi fisik tanpa reformasi proses tidak cukup. Standar terbuka dan pertukaran data yang aman mengurangi friksi, sedangkan kompetisi serta pengawasan mencegah simpul logistik menjadi rente.

Kedelapan, kontrak sosial keterbukaan perlu diperbarui. Pemerintah harus mampu mengidentifikasi pekerja, perusahaan, dan wilayah yang terkena perubahan perdagangan, teknologi, serta iklim. Dukungan mencakup pelatihan yang terkait lowongan nyata, asuransi pengangguran, penempatan, mobilitas, perumahan, childcare, pembiayaan UMKM, dan kebijakan berbasis wilayah. Pekerja dilibatkan dalam redesign proses. Tanpa mekanisme transisi, manfaat agregat globalisasi akan terus kehilangan legitimasi politik.

Kesembilan, diplomasi ekonomi harus menggabungkan perdagangan, investasi, teknologi, iklim, keamanan, dan pembangunan. Indonesia perlu menghindari ketergantungan berlebihan pada satu mitra tanpa menutup hubungan yang bermanfaat. Perjanjian dievaluasi berdasarkan akses pasar, policy space, transfer kemampuan, standar, penyelesaian sengketa, dan konsistensi dengan tujuan iklim. Koalisi isu bersama negara menengah serta Global South dapat memperkuat suara Indonesia dalam reformasi tata kelola global.

Kesepuluh, strategi menuju 2045 membutuhkan scorecard publik. Indikator meliputi produktivitas, kompleksitas ekspor, domestic value added, diversifikasi pasar dan pemasok, ekspor jasa, R&D, kualitas pekerjaan, ketahanan logistik, emisi, energi bersih, mobilitas talenta, dan kepercayaan. Stress test dilakukan pada skenario konflik, pandemi, bencana, guncangan harga, serta fragmentasi teknologi. Kebijakan yang gagal diperbaiki atau dihentikan, sehingga transformasi menjadi proses belajar, bukan kumpulan proyek.

Prinsip Implementasi dan Pengukuran

Implementasi membutuhkan prioritas dan sequencing. Indonesia tidak dapat membangun seluruh kapabilitas sekaligus. Setiap misi dimulai dari diagnosis market failure, coordination failure, dependency, serta peluang learning. Pemerintah lalu memilih instrumen paling ringan yang efektif, menguji pilot, dan memperluas hanya bila hasil terbukti. Risiko fiskal, perdagangan, lingkungan, persaingan, serta capture dinilai sejak awal. Kebijakan memiliki target antara, pemilik program, jadwal, anggaran, dan exit criteria. Pendekatan ini mengubah strategi globalisasi dari slogan menjadi portofolio investasi yang dapat dikelola.

Pengukuran harus melampaui nilai investasi, produksi, dan ekspor bruto. Statistik perlu memisahkan nilai tambah domestik, upah, laba, pajak, kandungan impor, R&D, kepemilikan teknologi, kualitas pekerjaan,

emisi, serta pembentukan pemasok. Diversifikasi diukur berdasarkan konsentrasi efektif, bukan jumlah negara pada daftar. Ketahanan diukur melalui waktu pulih, substitusi, inventory, logistics variability, dan akses pembiayaan. Dashboard publik memberi ruang bagi akademisi, dunia usaha, pekerja, dan masyarakat menilai apakah kebijakan menghasilkan transformasi atau sekadar aktivitas.

Tata kelola memerlukan koordinasi lintas kementerian tanpa menghapus checks and balances. Kebijakan perdagangan, industri, investasi, energi, pendidikan, tenaga kerja, digital, fiskal, dan lingkungan harus berbagi sasaran serta data. Dewan koordinasi membutuhkan unit analitik profesional, tetapi keputusan dukungan tetap transparan dan dapat diaudit. Konsultasi melibatkan perusahaan besar, UMKM, pekerja, daerah, akademisi, dan komunitas terdampak. Evaluasi independen serta publikasi penerima insentif mengurangi capture. Institusi yang dapat belajar menjadi sumber keunggulan ketika dunia berubah cepat.

Prinsip Normatif: Keterbukaan Strategis

Globalisasi yang sah bukan sekadar kebebasan modal dan barang bergerak, melainkan tatanan yang memperluas kemampuan manusia serta ruang kebijakan demokratis. Pasar internasional diperlukan untuk spesialisasi, inovasi, dan pertukaran; negara menetapkan perlindungan sosial, persaingan, keamanan, lingkungan, dan tujuan pembangunan; pekerja serta komunitas memiliki suara atas perubahan yang memengaruhi kehidupannya; perusahaan menerima imbalan atas investasi tetapi bertanggung jawab atas externalities; institusi multilateral menyediakan aturan dan forum koreksi. Prinsip proportionality mencegah keamanan menjadi alasan proteksi tanpa batas. Prinsip subsidiarity menempatkan keputusan pada tingkat lokal, nasional, regional, atau global sesuai skala masalah. Prinsip capability menilai kebijakan dari kemampuannya memperluas pengetahuan, produktivitas, pilihan, serta martabat. Dengan kerangka ini, Indonesia tidak perlu memilih antara globalisme tanpa kendali dan nasionalisme ekonomi tertutup. Keterbukaan strategis berarti tetap terhubung, mendiversifikasi hubungan, membangun kemampuan domestik, membagi manfaat, serta menjaga kemampuan mengubah arah ketika kondisi berubah.

Matriks Globalisasi Baru bagi Indonesia

Dimensi	Pertanyaan evaluasi	Indikator utama
Perdagangan	Apakah pasar dan pemasok cukup beragam?	konsentrasi, ekspor, substitusi
Rantai nilai	Apakah partisipasi menghasilkan upgrading?	DVA, pemasok, R&D, produktivitas
Ketahanan	Apakah fungsi penting cepat pulih?	lead time, stok, alternatif, stress test
Digital	Apakah jasa dan AI memperluas kemampuan?	ekspor jasa, compute, talenta, UMKM
Hijau	Apakah daya saing sejalan dengan transisi?	emisi, energi bersih, traceability

Dimensi	Pertanyaan evaluasi	Indikator utama
Inklusi	Siapa menerima manfaat dan biaya?	upah, pekerjaan, wilayah, perlindungan
Diplomasi	Apakah kemitraan memperbesar pilihan?	akses pasar, standar, diversifikasi

Sumber: sintesis penulis berdasarkan ekonomi perdagangan, rantai nilai global, geoekonomi, transformasi digital, dan transisi hijau.

Glossarium

Autarki: Keadaan ketika negara berupaya memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri dengan ketergantungan minimal pada perdagangan.

China-plus-one: Strategi perusahaan mempertahankan operasi di Tiongkok sambil menambah basis produksi di negara lain.

Connector country: Negara yang menghubungkan arus perdagangan, investasi, atau produksi di antara blok ekonomi.

Contestability: Kemudahan pesaing masuk dan menantang kekuasaan pelaku dominan.

Decoupling: Pemisahan hubungan ekonomi atau teknologi antara negara atau blok.

Diversifikasi: Penyebaran sumber pemasok, pasar, teknologi, dan pembiayaan untuk mengurangi konsentrasi risiko.

Domestic value added: Bagian nilai ekspor yang benar-benar diciptakan oleh faktor produksi domestik.

Friendshoring: Pemindahan atau pemusatan rantai pasok pada negara yang dianggap memiliki kedekatan strategis.

Geoeconomics: Penggunaan hubungan dan instrumen ekonomi untuk tujuan geopolitik maupun keamanan.

Global value chain: Rangkaian aktivitas penciptaan nilai yang tersebar di beberapa negara.

Green protectionism: Pembatasan perdagangan yang memakai alasan lingkungan tetapi dapat melindungi produsen domestik.

Hilirisasi: Pengembangan pengolahan dan aktivitas bernilai tambah setelah tahap ekstraksi bahan mentah.

Hyperglobalization: Fase integrasi sangat dalam yang menekankan liberalisasi, efisiensi, dan mobilitas lintas batas.

Industrial policy: Intervensi terarah untuk membentuk struktur produksi, teknologi, dan kemampuan industri.

Interdependensi: Keadaan ketika negara atau pelaku saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan.

Nearshoring: Pemindahan produksi atau pemasok ke negara yang secara geografis lebih dekat.

Network effects: Keadaan ketika nilai platform meningkat seiring bertambahnya pengguna atau peserta.

Re-globalization: Perluasan dan pembaruan integrasi global agar lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Regionalisasi: Peningkatan konsentrasi hubungan ekonomi di dalam suatu kawasan.

Reshoring: Pemindahan kembali produksi dari luar negeri ke negara asal perusahaan.

Resilience: Kemampuan sistem mengantisipasi, menyerap, beradaptasi, dan pulih dari gangguan.

Slowbalization: Perlambatan sebagian indikator integrasi global tanpa berarti berakhirnya globalisasi.

Strategic interdependence: Pengelolaan ketergantungan melalui diversifikasi, kapasitas, daya tawar, dan kerja sama.

Supply-chain visibility: Kemampuan melihat pemasok, aliran, inventori, dan risiko di sepanjang rantai pasok.

Upgrading: Perpindahan menuju fungsi, teknologi, produktivitas, atau nilai tambah yang lebih tinggi.

Daftar Pustaka

- Antràs, P. (2020). De-globalisation? Global value chains in the post-COVID-19 age (NBER Working Paper No. 28115). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w28115>
- Baldwin, R. (2016). The great convergence: Information technology and the new globalization. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674972667>
- Baldwin, R., & López-González, J. (2015). Supply-chain trade: A portrait of global patterns and several testable hypotheses. *The World Economy*, 38(11), 1682–1721. <https://doi.org/10.1111/twec.12189>
- Gereffi, G. (2020). What does the COVID-19 pandemic teach us about global value chains? The case of medical supplies. *Journal of International Business Policy*, 3, 287–301. <https://doi.org/10.1057/s42214-020-00062-w>
- Gopinath, G., Gourinchas, P.-O., Presbitero, A. F., & Topalova, P. (2024). Changing global linkages: A new Cold War? IMF Working Paper, 2024(076). <https://doi.org/10.5089/9798400272745.001>
- Jones, E., & Adam, C. (2023). New frontiers of trade and trade policy: Digitalization and climate change. *Oxford Review of Economic Policy*, 39(1), 1–11. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grac048>
- Kano, L., Tsang, E. W. K., & Yeung, H. W.-C. (2020). Global value chains: A review of the multi-disciplinary literature. *Journal of International Business Studies*, 51, 577–622. <https://doi.org/10.1057/s41267-020-00304-2>
- Miroudot, S. (2020). Resilience versus robustness in global value chains: Some policy implications. In R. Baldwin & S. Evenett (Eds.), *COVID-19 and trade policy*. CEPR Press. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3616806>
- Petricevic, O., & Teece, D. J. (2019). The structural reshaping of globalization: Implications for strategic sectors, profiting from innovation, and the multinational enterprise. *Journal of International Business Studies*, 50, 1487–1512. <https://doi.org/10.1057/s41267-019-00269-x>
- Pla-Barber, J., Villar, C., & Narula, R. (2021). Governance of global value chains after the COVID-19 pandemic: A new wave of regionalization? *Business Research Quarterly*, 24(3), 204–213. <https://doi.org/10.1177/23409444211020761>

- Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199603336.001.0001>
- Schwellnus, C., Haramboure, A., & Samek, L. (2023). Policies to strengthen the resilience of global value chains: Empirical evidence from the COVID-19 shock. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/fd82abd4-en>
- Skare, M., & Soriano, D. R. (2021). How globalization is changing digital technology adoption: An international perspective. *Journal of Innovation & Knowledge*, 6(4), 222–233. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2021.04.001>
- United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *Digital economy report 2024: Shaping an environmentally sustainable and inclusive digital future*. United Nations. <https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2024>
- Van Assche, A., & Gangnes, B. (2019). Global value chains and the fragmentation of trade policy coalitions. *Transnational Corporations*, 26(1), 31–60. <https://doi.org/10.18356/fceb3d6a-en>
- World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1457-0>
- World Trade Organization. (2023). *World trade report 2023: Re-globalization for a secure, inclusive and sustainable future*. WTO. https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr23_e.htm
- World Trade Organization. (2025). *Global value chain development report 2025: Rewiring global value chains in a changing global economy*. WTO. https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/gvcd_report_25_e.htm